

Sebelum Peristiwa Pemberontakan 1926: Perebutan Ruang Publik Sarekat Rakyat di Priangan, 1920-1926

Dharyanto Tito Wardani,^{1*} A. Fadhilah Utami Ilmi Rifai¹

¹Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sam Ratulangi, Indonesia

Email: dharyantotitowardani@unsrat.ac.id, fadhilah@unsrat.ac.id

*Korespondensi



Received: 09-02-2026, Revised: 13-07-2026, Accepted: 16-07-2026, Published: 30-07-2026

Abstrak

Pada periodisasi pergerakan nasional dalam sejarah Indonesia perlawanan intelektual pribumi dilakukan dengan menggunakan organisasi yang bersifat modern salah satunya adalah Sarekat Islam mengalami perpecahan dan faksi kiri membentuk Sarekat Rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi dan menganalisis proses perebutan ruang publik serta dinamika konflik ideologis dalam organisasi Sarekat Islam yang berujung pada lahirnya Sarekat Rakyat di wilayah Priangan sebelum peristiwa pemberontakan 1926. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah yang terdiri dari empat tahapan kerja: heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi (eksplanasi). Konsep dan teori yang digunakan adalah konsep dan teori hegemoni atau kekuasaan Antonio Gramsci. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sejarah pergerakan nasional melalui organisasi modern Sarekat Islam ini mengalami perkembangan yang cukup sulit. Perbedaan ini dimulai dari kepentingan setiap pemimpin organisasi Sarekat Islam di setiap daerah, dan selalu terjadi persaingan untuk memutuskan kebijakan dan langkah strategis dan politik organisasi Sarekat Islam. Perebutan ruang publik yang dilakukan Sarekat Rakyat di Priangan pada periode 1920–1926 membawa perubahan penting dalam dinamika politik masyarakat. Melalui rapat umum (*vergadering*), propaganda, dan berbagai kegiatan organisasi, Sarekat Rakyat berhasil menjadikan ruang publik sebagai sarana untuk menyebarkan gagasan anti-kolonial dan membangun kesadaran politik rakyat. Akibatnya, ruang publik yang sebelumnya lebih banyak dikendalikan oleh pemerintah kolonial dan kelompok Sarekat Islam berubah menjadi arena kontestasi politik antara Sarekat Rakyat, Sarekat Islam, PKI, dan pemerintah Hindia Belanda. Perkembangan ini memperkuat pengaruh Sarekat Rakyat di Priangan, tetapi sekaligus memicu tindakan represif pemerintah kolonial berupa pengawasan, pembubaran rapat, penangkapan aktivis, dan pembatasan aktivitas politik menjelang peristiwa pemberontakan 1926.

Kata Kunci: Hegemoni; Partai Komunis Indonesia; Ruang Publik; Sarekat Islam; Sarekat Rakyat

Abstract

In the periodization of the national movement in Indonesian history, indigenous intellectual resistance was carried out through modern organizations, one of which was the Sarekat Islam, which split, with the left faction forming the Sarekat Rakyat. This study aims to reconstruct and analyze the struggle for public space and the dynamics of ideological conflict within the Sarekat Islam organization, culminating in the formation of the Sarekat Rakyat in the Priangan region before the 1926 rebellion. The research method used is the historical method consisting of four stages of work: heuristics, criticism, interpretation, and historiography (explanation). The concepts and theories used are the concepts and theories of hegemony or power of Antonio Gramsci. The results of this study conclude that the

history of the national movement through the modern Sarekat Islam organization experienced quite difficult developments. This difference began with the interests of each leader of the Sarekat Islam organization in their region, and there was always competition over the policies and strategic and political steps of the organization. The struggle for public space carried out by the Sarekat Rakyat in Priangan during 1920–1926 brought important changes to the political dynamics of society. Through public meetings (*vergadering*), propaganda, and various organizational activities, Sarekat Rakyat succeeded in transforming the public sphere into a vehicle for disseminating anti-colonial ideas and building popular political awareness. As a result, the public sphere, previously largely controlled by the colonial government and the Sarekat Islam group, became an arena for political contestation between Sarekat Rakyat, Sarekat Islam, the Indonesian Communist Party (PKI), and the Dutch East Indies government. This development strengthened Sarekat Rakyat's influence in Priangan but also triggered repressive measures by the colonial government, including surveillance, the disbandment of meetings, arrests of activists, and restrictions on political activity in the lead-up to the 1926 rebellion.

Keywords: Hegemony; Indonesian Communist Party; Public Sphere; Sarekat Islam; Sarekat Rakyat



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Pendahuluan

Pukulan terberat bagi pergerakan nasional di Indonesia pada periode tahun 1920 sampai 1925 adalah perpecahan di tubuh internal organisasi pergerakan (Karim & Siregar, 2023). Sarekat Islam (selanjutnya disingkat SI) merupakan "*metamorfosis*" dari organisasi Sarekat Dagang Islam yang dibentuk oleh H. Samanhoedi dan R. M. Tirto Adhi Soerjo (Achdian, 2017; Rizkianto, 2022).¹ Kebangkitan SI dimulai pada tahun 1912 yang diawali dengan peristiwa ketika SI mengubah nama organisasi yang semula Sarekat Dagang Islam (SDI). Organisasi Sarekat Dagang Islam dibentuk dengan maksud membantu para pedagang-pedagang di Hindia Belanda. Cabang-cabang organisasi SDI dibentuk di Solo (Jawa Tengah) dan di Surabaya (Jawa Timur). SDI cabang Surabaya dipimpin oleh H. O. S. Tjokroaminoto (Wardani, 2016).

Pada tahun 1909 Haji Samanhoedi, seorang pedagang batik dari Lawean Solo, menghubungi Tirto Adhi Soerjo dan mendirikan organisasi untuk para pedagang Islam. Sarekat Dagang Islam (SDI) dibentuk ketika perkumpulan pedagang Islam di kota batik Surakarta, dimulai oleh Haji Samahoedi yang menghubungi Tirto Adhi Soerjo yang inisiatifnya mendirikan organisasi dengan nama yang sama di Bogor (Adam, 2003). Menurut Ricklefs, organisasi Sarekat Dagang Islam ini dibentuk pada tahun 1910 di Bogor. Pada tahun 1911, Tirto Adhi Soerjo mendorong seorang pedagang batik yang berhasil di Surakarta bernama Haji Samanhudi (1868-1956) untuk mendirikan organisasi Sarekat Dagang Islam sebagai suatu koperasi pedagang batik Jawa (Ricklefs, 2008).

Organisasi Sarekat Dagang Islam (SDI) mengubah nama menjadi Sarekat Islam (SI) pada tahun 1912. Hal ini dilakukan agar cakupan gerakan organisasi Sarekat

¹Pada tahun 1909 H. Samanhoedi pedagang batik dari Lawean (Solo) menghubungi R. M. Tirto Adhi Soerjo dan mendirikan organisasi untuk para pedagang Islam. Organisasi SDI dibentuk dengan maksud membantu pedagang-pedagang Islam di Indonesia.

Islam tidak hanya dibidang ekonomi dan perdagangan saja, melainkan masuk ke seluruh bidang yang menjadi aspirasi penduduk pribumi (Jayusman & Shavab, 2021). Sejak tahun 1912 SI berkembang sangat pesat, dan pertama kalinya basis rakyat berada didalam organisasi ini. Jumlah anggota SI pada tahun 1919 sampai 2 juta orang (Pringgodigdo, 1994).

Ketika Sarekat Dagang Islam (SDI) berdiri di Surabaya, Hadji Oemar Said (H.O.S.) Tjokroaminoto dipilih sebagai ketua SDI Cabang Surabaya. Pada saat itu, Tjokroaminoto masih bekerja sebagai pegawai pemerintahan Hindia Belanda, tetapi kemudian memutuskan untuk mengundurkan diri agar dapat fokus pada aktivitas organisasi. H.O.S. Tjokroaminoto dikenal sebagai tokoh yang kharismatik dan memiliki pengaruh besar di kalangan masyarakat (Ahmad, 2021). Ia bersikap tegas dalam mengkritik penyalahgunaan kekuasaan tanpa membedakan latar belakang pelakunya, baik pejabat pemerintah berkebangsaan Belanda maupun pribumi. Berkat kepemimpinan dan kemampuan orasinya, Tjokroaminoto dengan cepat tampil sebagai salah satu pemimpin pergerakan rakyat yang paling menonjol pada masanya. Pada tahun 1912, organisasi tersebut kemudian mengubah namanya dari Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam (Ricklefs, 2008).

Pada masa kepemimpinan H.O.S. Tjokroaminoto, Sarekat Islam (SI) tidak lagi berorientasi semata-mata pada bidang ekonomi dan perdagangan, tetapi mulai berperan aktif dalam kehidupan politik di Hindia Belanda. SI berkembang sebagai gerakan kebangkitan (*revivalisme*) yang memadukan kesadaran keagamaan dengan perjuangan sosial dan politik. Kesadaran religius tersebut membentuk pandangan serta semangat perjuangan para anggotanya sehingga mampu menarik dukungan masyarakat dalam jumlah besar, termasuk dari kalangan ulama dan tokoh agama. Pada Kongres SI tahun 1917 di Jakarta, organisasi ini menyatakan keinginannya untuk mewujudkan pemerintahan sendiri bagi penduduk Hindia Belanda. Masuknya Tjokroaminoto dan Abdoel Moeis ke dalam Volksraad, serta dukungan SI terhadap kebijakan *Indie Weerbaar*, dipandang sebagai langkah strategis untuk memperjuangkan tujuan tersebut. Namun, kongres ini juga menjadi awal munculnya perdebatan di kalangan elite SI mengenai arah perjuangan organisasi. Kelompok SI yang terpengaruh pemikiran sosialisme radikal yang berkembang di Semarang di bawah pengaruh *Sneevliet* menolak konsep *Indie Weerbaar* dan mengkritik keterlibatan Abdoel Moeis dalam *Volksraad*. Di tengah pesatnya pertumbuhan anggota dan semakin besarnya pengaruh SI, perbedaan pandangan ideologis tersebut semakin mempertajam konflik internal organisasi. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan oleh organisasi ISDV—yang kelak berkembang menjadi PKI—untuk memperluas pengaruhnya di lingkungan SI, sehingga memicu perpecahan organisasi berdasarkan perbedaan ideologi dan strategi perjuangan.

Penelitian terkait Sarekat Islam sudah banyak dilakukan seperti penelitian Shiraishi (2005), McVey (2009), Wardani (2015; 2016), Ahmad (2021), Ahmad & Mahasta (2021), dan Karim & Siregar (2023). Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap perebutan ruang publik oleh Sarekat Rakyat di Priangan tahun 1920–1926. Apabila penelitian sebelumnya lebih banyak membahas perpecahan Sarekat Islam, perkembangan PKI, atau media pergerakan, penelitian ini menempatkan ruang publik sebagai arena kontestasi politik antara Sarekat Rakyat, Sarekat Islam, PKI, dan pemerintah kolonial. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bagaimana aktivitasvergadering, propaganda, dan organisasi massa

menjadi instrumen Sarekat Rakyat untuk membangun pengaruh politik sekaligus memunculkan respons represif pemerintah kolonial.

Penelitian ini menggunakan teori hegemoni Antonio Gramsci (Femia, 1977). Teori hegemoni menjelaskan bahwa kekuasaan tidak hanya dijalankan melalui paksaan atau kekuatan negara, tetapi juga melalui pembentukan pengaruh, persetujuan, dan kepemimpinan intelektual dalam masyarakat (Urbinati, 1998). Dalam konteks penelitian ini, teori Gramsci digunakan untuk menganalisis bagaimana Sarekat Rakyat berupaya memperoleh pengaruh politik di ruang publik Priangan melalui rapat umum, propaganda, dan mobilisasi masyarakat, serta bagaimana pemerintah kolonial mempertahankan hegemoninya melalui pengawasan dan tindakan represif.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi dan menganalisis proses perebutan ruang publik yang dilakukan Sarekat Rakyat di Priangan pada periode 1920–1926, serta menjelaskan dinamika konflik ideologis yang melatarbelakangi lahirnya Sarekat Rakyat dan pengaruhnya terhadap perkembangan gerakan anti-kolonial menjelang peristiwa pemberontakan 1926. Penelitian ini penting karena kajian mengenai Sarekat Rakyat selama ini lebih banyak ditempatkan sebagai bagian dari sejarah PKI atau perpecahan Sarekat Islam. Padahal, Sarekat Rakyat memiliki peran penting dalam membangun kesadaran politik rakyat melalui penguasaan ruang publik di tingkat lokal. Dengan mengkaji pengalaman Priangan, penelitian ini dapat menjelaskan bagaimana ruang publik menjadi arena perjuangan politik rakyat pada masa kolonial serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai akar sosial-politik yang melatarbelakangi munculnya perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda menjelang peristiwa 1926.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah. Metode penelitian sejarah atau yang biasa disebut dengan metode sejarah adalah suatu usaha untuk mempelajari dan mengenali fakta-fakta serta menyusun simpulan mengenai peristiwa masa lalu. Tujuannya untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif (Gottschalk, 2008, Garraghan. 1957: 34).

Tahapan kerja metode sejarah terbagi dalam empat tahapan. Tahap pertama adalah heuristik. Heuristik merupakan tahap awal setelah kita telah menentukan topik atau permasalahan penelitian. Heuristik merupakan proses pencarian atau penelusuran sumber sejarah. Menemukan dan menghimpun sumber sejarah yang terkait dan menjadi pokok permasalahan penelitian. Tahap heuristik atau tahap pencarian sumber sejarah ini dilakukan terhadap sumber sejarah tertulis berupa arsip, sumber resmi tercetak, dokumen, buku dan lain-lain. Pencarian sumber primer berbentuk sumber resmi tercetak arsip dilaksanakan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di Jalan Ampera Raya No. 7, Jakarta. Selain pencarian dokumen dalam bentuk arsip, pencarian sumber primer berbentuk sumber resmi tercetak dalam bentuk surat kabar dilaksanakan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI). Pencarian sumber sekunder berbentuk buku dilakukan di beberapa perpustakaan diantaranya, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah.

Pencarian sumber di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI), beberapa dokumen atau surat kabar yang membahas dinamika organisasi SI cukup komprehensif, diantaranya surat kabar *Kaoem Kita* yang terbit pada 27-29 Oktober tahun 1924, surat kabar *Matahari* yang terbit pada tanggal 27 Agustus tahun 1922, pada tanggal 22 September 1922, pada tanggal 15 Maret 1923, dan 17 April 1923, surat kabar *Sinar Hindia* yang terbit pada tanggal 8 Mei 1918 dan surat kabar *Soerapati* yang terbit pada tanggal 20 Januari 1924 dan 26 November 1924.

Hasil dan Pembahasan

Dinamika Konflik Ideologis dan Lahirnya Sarekat Rakyat

Pada tahun 1917 H.O.S Tjokroaminoto menyampaikan pernyataannya di kongres CSI. Tjokro menjelaskan bahwa CSI sejalan dengan gagasan Sosialisme. CSI pada dasarnya ingin mengangkat semua ras di Hindia Belanda hingga mencapai pemerintahan sendiri, dan CSI pun menolak sistem atau kebijakan politik Kapitalisme (Kemodalan). Namun hal ini sangat bertabrakan dengan kenyataan yang terjadi. Abdoel Moeis yang sepakat dengan *Indie Weerbaar* membuat pandangan SI Radikal sayap kiri terlihat kecewa. Terlihat awal dinamika ditubuh SI dengan beberapa internal SI yang sepakat dan tidak dengan konsep *Indie Weerbaar*. Hasil kongres CSI akhirnya sepakat dengan *Volksraad* dan gerakan *Indie Weerbaar*. Ketika kongres berlangsung beberapa SI lokal menolak putusan kongres yang menyetujui adanya dukungan SI terhadap *Indie Weerbaar*. Salah satu SI lokal yang mengutuk keras putusan kongres ini berasal dari SI cabang Semarang yang dipimpin oleh Semaoen. Semaoen sebagai ketua SI cabang Semarang menegaskan bahwa “*Kami tidak soeka, keloearken darah oentoek keperloean orang lain, apalagi keperloean “zondig-kapitalisten” (Kapitalisme besar yang tidak menguntungkan)*” (*Sinar Hindia*, 1918). Hampir setengah dari anggota kongres CSI yang hadir mendukung pernyataan Semaoen, namun suara mayoritas menolak pernyataan Semaoen hingga akhirnya konflik ditubuh SI tidak dapat dihindarkan lagi.

Dalam kondisi yang tidak menentu di kalangan SI. Tjokroaminoto terlihat ingin menyapu puing-puing yang menjadi kerikil kecil dalam perjalanan SI. Tjokroaminoto yang mempunyai pandangan sosialisme, akhirnya dapat merealisasikan gerakan SI ke dalam gerakan praktis perlawanan terhadap pemerintahan kolonial dan pemilik modal swasta pabrik dan perkebunan. Kongres CSI keempat membahas persoalan sebuah organisasi sentral untuk kaum buruh yang berada di dalam naungan CSI. Selain Tjokro ingin tidak ada perseteruan dan konflik di tubuh SI, Tjokro pun memperlihatkan bahwa haluan ideologi SI pada dasarnya condong ke arah Sosialisme yang menolak Kapitalisme. Akhirnya Tjokro mulai mengambil alih organisasi Persatoean Pergerakan Kaoem Boeroeh (PPKB) sebagai organisasi buruh yang bernaung di bawah CSI, juga memasukkan beberapa anggota SI yang berasal dari SI sayap radikal menjadi pengurus PPKB. Susunan kepengurusan PPKB hasil dari kongres CSI keempat ini antara lain sebagai berikut:

Ketua/Bendahara	: Tjokroaminoto
Wakil-wakil Ketua	: Abdoel Moeis, Soerjopranoto
Sekretaris	: Sosrokardono, Brotosoeharjo dan

Rachman
Komisaris-komisaris : Djajadiningrat,
Semaoen, Soekirno,
Haji Agoes Salim,
Haji Sjadzili,
Alimin,
Mas Marco,
H. Fachroeddin,
Abikoesno
Tjokrosoejoso,
Moh. Samin
(Soematra Oetara),
Branata
(Soematra Selatan)
dan
Amir Hasan
(Kalimantan)(Gie, 1999).

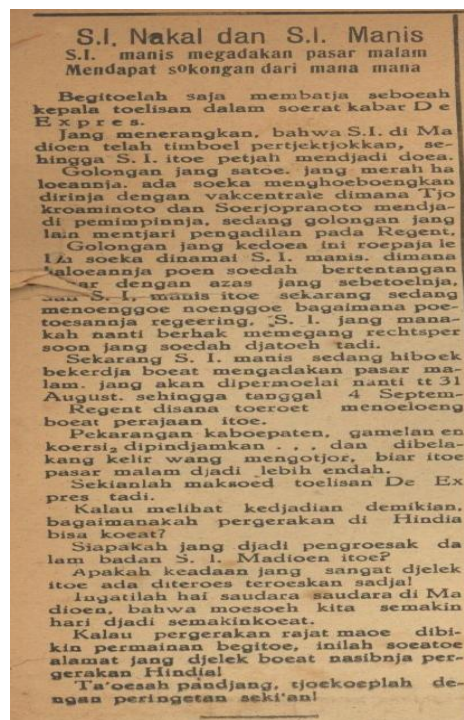
PPKB pertama kali dibentuk memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada SI Cabang Semarang yaitu Semaoen. Namun karena kegagalan Semaoen dalam aksi pemogokan PPKB menjelang tahun 1920. PPKB akhirnya diambil alih oleh August Salim. Semaoen yang kecewa dengan pengambilalihan ini membuat SI kembali berdinamika di tubuh internalnya bagi elite pengurus CSI. Perdebatan yang terjadi di tubuh internal SI berlangsung pun terlihat ketika Sidang SI ke lima di Yogyakarta pada tahun 1920. Ini adalah bukti bahwa SI sudah terbagi menjadi dua, ada yang mulai cenderung berfikir radikal yang telah disusupi oleh paham komunisme² dan masih berbicara perjuangan atas dasar Islam. Kongres SI kelima ini SI menetapkan suatu dasar baru, yang disusun oleh H.A Salim, dan Semaoen. Di dalamnya disebutkan bahwa penjajahan dalam lapangan kebangsaan dan perekonomian itu adalah akibat dari *kapitalisme*, sedangkan *kapitalisme* itu hanya dapat dikalahkan oleh persatuan kaum buruh dan tani.

Kongres Sarekat Islam (SI) yang menjadi titik awal perebutan ruang publik dan pengaruh politik di lingkungan internal organisasi diselenggarakan di Yogyakarta pada Maret 1921 (Ahmad & Mahasta, 2021). Salah satu agenda utama kongres tersebut adalah pembahasan cita-cita Pan-Islamisme sebagai dasar perjuangan organisasi. Dalam kongres itu, H. Fachrudin, yang menjabat sebagai wakil ketua Muhammadiyah sekaligus anggota SI, menyebarkan brosur yang menyatakan bahwa cita-cita Pan-Islamisme tidak akan tercapai apabila SI bekerja sama dengan kelompok komunis. Pandangan tersebut didukung oleh Agus Salim yang secara terbuka mengkritik SI Cabang Semarang karena dianggap terlalu dekat dengan PKI. Kritik tersebut kemudian dibalas oleh Darsono, salah satu tokoh SI yang memiliki kedekatan dengan gerakan komunis. Kelompok SI Semarang menentang

²Sejak didirikan ISDV dan VSTP melihat perkembangan gerakan organisasi SI di Hindia sangat berkembang pesat. Dengan pemikiran progresif dan radikal ISDV dan VSTP Semarang dapat mempengaruhi Semaoen kader SI dari Cabang Semarang untuk menempel guna memperbanyak massa.

pencampuran agama dan politik dalam organisasi, sedangkan Tjokroaminoto cenderung mendukung gagasan Pan-Islamisme sebagai landasan perjuangan SI.

Hasil kongres akhirnya menetapkan dukungan organisasi terhadap cita-cita Pan-Islamisme. Keputusan ini menunjukkan kekalahan kelompok SI Semarang dalam memperebutkan pengaruh di tubuh SI sekaligus mempertegas perbedaan ideologis yang berkembang dalam organisasi. Dari perdebatan tersebut lahir istilah SI Putih dan SI Merah untuk membedakan dua arus pemikiran yang saling berhadapan di dalam SI. Pada tahun 1922, pertentangan antara kedua kelompok tersebut masih terus berlanjut. Surat kabar Matahari yang terbit pada September 1922 bahkan menggambarkan dinamika tersebut melalui sebutan anekdot “SI Manis” dan “SI Nakal”. Sebutan tersebut merujuk pada kelompok-kelompok yang terlibat dalam perdebatan politik pasca-Kongres Yogyakarta dan semakin menguat setelah perkembangan konflik yang berlanjut hingga Kongres SI di Madiun.



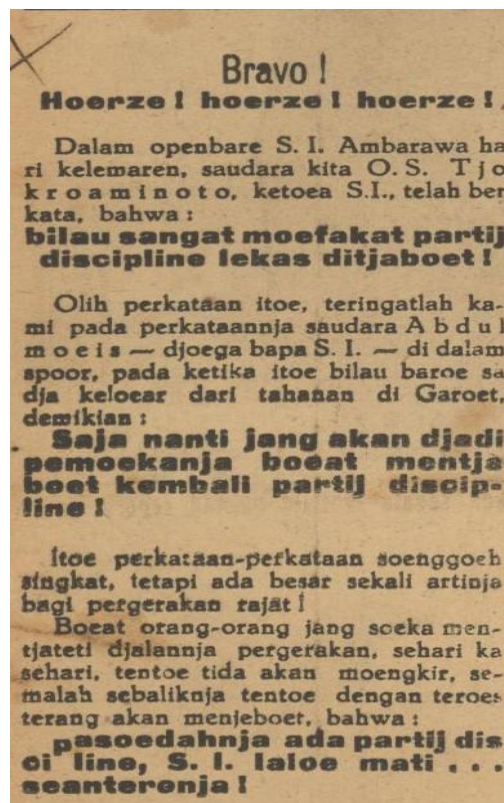
Gambar 1. Berita tentang Sarekat Islam di Surat Kabar Matahari Tahun 1922
Sumber: Matahari, 22 September 1922

Hasil kongres Madiun SI yang masih berbicara masalah kesejahteraan rakyat dan selalu menolak keputusan yang dibuat oleh pemerintah disebut SI Nakal, sedangkan SI yang mendukung setiap kebijakan pemerintah disebutlah SI Manis SI yang telah tersusupi oleh ideologi radikal ini diawali ketika seorang pelarian politik dari Belanda bernama Sneevliet datang ke Indonesia dan mendirikan organisasi *Indische Sociaal-Democratische Vereeniging* (ISDV) pada tahun 1914. ISDV yang berhaluan sosialis memandang perlu mempropaganda rakyat mengenai pokok-pokok dasar dari prinsip sosialisme. Kaum sosialis berpendapat bahwa gagasan sosialisme dapat memiliki peranan langsung di daerah koloni, ia akan mendorong siap revolusioner anti-imperialisme (McVey, 2009).

Anti imperialisme tidak hanya menjadi kekuatan dasar perlawanan organisasi ISDV pada pemerintahan Hindia Belanda. Anti-imperialisme menjadi syarat utama kaum muda pergerakan menuju bangsa Indonesia yang mandiri. ISDV yang mencakup hampir seluruh kaum sosialis di Indonesia tidak mendapat dukungan secara luas dari rakyat Pribumi bahkan para elite pemerintahan. ISDV sangat sulit dalam mengembangkan organisasi, namun pada tahun 1917 ISDV berubah. ISDV mulai masuk ke dalam tubuh SI. Ketua Cabang SI yang setuju dengan gerakan ISDV adalah Semaon ketua Cabang SI di Semarang (Wardani, 2015). Rickfles menjelaskan:

Pada tahun 1914, seorang pemuda Jawa buruh kereta api yang bernama Semaon menjadi anggota SI cabang Surabaya. Pada tahun 1915, dia pindah ke Semarang, di mana Sneevliet aktif dalam Serikat Buruh Kereta Api dan Trem (VSTP). Kini Semaon juga bergabung dengan ISDV. Jumlah anggota SI Semarang berkembang pesat mencapai 20.000 orang pada tahun 1917, kelompok radikal tampak memperoleh dukungan yang sangat besar. Tjokroaminoto khawatir akan memulai pertikaian intern dengan mereka dan setuju melontarkan terhadap kapitalisme yang “berdosa”; dengan demikian, nyata-nyata mengecam modal asing dan Cina, tetapi bukan modal yang ada pada para haji Indonesia dan lain-lainnya (Ricklefs, 2008).

Perkembangan selanjutnya SI yang telah disusupi oleh ISDV menjadi radikal dan berhaluan sosialisme kiri, pecah di internal tubuh SI. Menjadi SI merah dan Sarekat Rakyat. ISDV kemudian berubah menjadi PKI. Jadi perlu ditegaskan disini bahwa SI, SI Merah dan SR bukanlah PKI. Karena PKI adalah *metamorfosis* dari ISDV yang merubah namanya karena kebijakan *Commintern* yang harus menggunakan kata Partai dan wilayah (Negara)nya. Sedangkan SR adalah perkembangan dari SI yang mempunyai ide gagasan yang mengakar dan sangat ingin lepas dari belenggu imperialisme. Hal ini dikarenakan kalangan SR sering mendapatkan konsep-konsep modern tentang penjajahan (seperti contoh konsep kapitalisme, *reactive*, dan lain-lain).



Gambar 2. Hasil dari pertemuan SI di Ambarawa yang sepakat mencabut disiplin partai SI
Sumber: Matahari, 27 Agustus 1922.

Babak awal perpecahan di tubuh Sarekat Islam (SI) mulai terlihat pada awal dekade 1920-an, seiring menguatnya pengaruh organisasi *Indische Sociaal-Democratische Vereeniging* (ISDV) yang kemudian berkembang menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI). Pengaruh tersebut terutama tampak di SI Cabang Semarang yang menjadi basis utama penyebaran gagasan sosialisme dan komunisme. Meskipun demikian, upaya rekonsiliasi untuk mempertahankan persatuan organisasi tetap dilakukan, salah satunya melalui pencabutan kebijakan disiplin partai dalam pertemuan umum Central Sarekat Islam (CSI) di Ambarawa (Matahari, 1922).

Namun, upaya tersebut tidak berhasil meredakan konflik yang semakin tajam. Dalam Kongres SI di Madiun pada tahun 1923, organisasi menetapkan kembali kebijakan Disiplin Partai yang melarang anggota SI merangkap keanggotaan dalam PKI. Akibatnya, anggota SI yang terafiliasi dengan PKI dikeluarkan dari organisasi. Keputusan tersebut mendapat penolakan dari kelompok SI yang berhaluan kiri dan semakin memperuncing pertentangan di dalam tubuh organisasi. Situasi kongres digambarkan berlangsung dalam suasana yang tegang dan penuh konflik. Ratusan bendera merah menghiasi ruang sidang, perdebatan berlangsung keras, bahkan kericuhan sempat terjadi hingga podium digulingkan.

Setelah kongres berakhir, perselisihan antara kedua kelompok semakin meluas melalui polemik yang berkembang di berbagai surat kabar. Putusan kongres

SI ini yaitu; 1). Menetapkan disiplin partai terhadap PKI; 2). Menetapkan sikap non-koperasi terhadap pemerintahan Hindia-Belanda; 3). Mengubah SI menjadi Partai Sarikat Islam Hindia Timur yang kemudian berubah menjadi Partai Sarikat Islam Indonesia.

Suasana perdebatan kongres SI di Madiun ini sangat bernuasa politis dan perpecahan di SI akan segera tiba. Pemberita PSI mengumumkan bahwa kongres CSI akan dilaksanakan di Madiun membahas pembentukan PSI dan pengenalan disiplin partai. Redaksi pengenalan disiplin partai sebenarnya menitikberatkan bahwa anggota SI itu tidak boleh merangkap organisasi dengan PKI. Dengan keputusan disiplin partai yang melarang anggota SI merangkap di organisasi lain. Tjokro bertekad untuk melepaskan diri dari PKI, ia akan mendirikan cabang Partai Sarekat Islam (PSI) ini di mana saja ada cabang SI Merah. Cabang-cabang SI Merah pasca kongres dan dikeluarkan dari SI akhirnya membentuk Sarekat Rakjat (Ricklefs, 2008).

Suasana pertikaian SI dengan PKI pun berlangsung sampai Kongres SI di Madiun tahun 1923. Pada bulan Februari kongres CSI merupakan suatu hantaman bagi anggota PKI yang berada di tubuh Sarekat Islam. Shiraishi (2005) menjelaskan mengenai proses berjalannya kongres CSI di Madiun pada 1923:

“Kongres CSI di Madiun dihadiri 117 delegasi yang mewakili 40 SI-SI lokal. Meskipun SI Semarang, begitu juga pimpinan SI Komunis di Madiun, Cepu, Nganjuk, dan Bandung mengirimkan delegasinya. PKI telah menduga hasilnya sehingga Semaoen tidak hadir. SI/PKI Semarang mengirim Soekindar sebagai wakil, sementara SI Nganjuk, Madiun dan Bandung mengirim Soenarjo, Soekirno dan Mohammad Sanoesi sebagai delegasi mereka. Tjokroaminoto mengumumkan bahwa 45 dari 52 SI-SI lokal yang berpartisipasi dalam kongres adalah untuk organisasi PSI. Delegasi SI Madiun dan Nganjuk mengajukan usul untuk membuat pengecualian disiplin partai bagi PKI. Tetapi, karena dipotong oleh suara marah para hadirin, keduanya harus berhenti berbicara di tengah jalan. Salim mengatakan bahwa PKI membahayakan kesatuan Islam dan Tjokroaminoto menyatakan, “SI mempercayakan segala sesuatunya kepada Allah, sedang PKI tidak bersikap kepada Allah”.

Tjokroaminoto juga mengumumkan bahwa ia akan mengunjungi tempat-tempat dimana SI lokal ada di bawah kontrol komunis serta akan dibentuk afdeling SI dan PSI tandingan (Shiraishi, 2005). Kongres di Madiun ini merupakan satu kemunduran bagi SI, dan menjadi babak baru bagi Sarekat Rakjat. Menanggapi kongres CSI di Madiun, para pemimpin PKI mengadakan kongres PKI dan SI Merah pada awal Maret 1923 di Bandung dan Sukabumi.

Menanggapi hasil kongres SI/CSI di Madiun. SI yang bersayap radikal akhirnya menghadapi keputusan hasil kongres dan disiplin partai dengan pemecatan anggota SI. Akhirnya kongres SI bersayap radikal yang mengatasnamakan SI Merah melaksanakan kongres pada tanggal 4 Maret 1923. Satu bulan setelah kongres di Madiun SI Merah melaksanakan kongres di Bandung dan Sukabumi dihadiri oleh beberapa perwakilan dari PKI dan SI merah dan dimuat di beberapa surat kabar, diantaranya Matahari dan Soerapati. Perwakilan PKI ada 15 cabang: Bandung, Semarang, Wirosari, Yogyakarta, Salatiga, Madiun, Sumedang, Sukabumi, Rancaekek, Solo, Cirebon, Surabaya, Randublatung, Bogor dan Cicalengka.

Perwakilan dari SI merah lokal ada 13 cabang: Semarang, Wirosari, Bandung, Tasikmalaya, Yogyakarta, Purwokerto, Salatiga, Madiun, Sumedang, Sukabumi, Kaliwungu, Kendal dan Ungaran. Hasil dari kongres PKI dan SI merah di Bandung diantaranya adalah PKI dan SI Merah wajib melawan *kapitalisme* tembakau, gula dll.

Kongres yang dilaksanakan di Bandung dan Sukabumi ini akhirnya dapat ditegaskan bahwa PKI dan SI Merah pada dasarnya tidaklah sama (meskipun beberapa cabang PKI ada juga cabang SI Radikal) seperti contoh: Bandung, Semarang, Wirosari, Yogyakarta, Salatiga, Madiun, Sumedang, Sukabumi. Di beberapa kota yang hanya ada cabang PKI, diantaranya Rancaekek, Solo, Cirebon, Surabaya, Randublatung Bogor dan Cicalengka. Sedangkan beberapa kota yang ada cabang SI Merah (SI bersayap radikal) diantaranya: Tasikmalaya, Purwokerto, Kaliwungu, Kendal dan Ungaran.



Gambar 3. Berita di Surat Kabar Matahari Tahun 1923
Sumber: Matahari, 4 Maret 1923

“PKI dan SI sedjati mendjadi satoe. Dari sebab itoe. Dalam Kongres PKI dan SI-SI Merah (SI Sedjati) tanggal 6 Maret di Soekaboemi soedah di poatoes. PKI dan SI-SI Merah bersatoe dalam satu badan. Peratoeran dengan pendek begini:

1. Ditiap-tiap tempat dimana ada SI Merah mesti didirikan tjabang PKI
2. SI Merah dan PKI di itoe tempat misti bekerdja bersama-sama
3. Dalam bekerdja bersama-sama itoepoen mereka haroes melawan kapitalisme
4. Semoea oeroesan besar haroes diteroeskan oleh tjabang PKI dan SI Merah di tempat itoe pada hoofdbestuur PKI Semarang, adrevoorzitter Semaoen Semarang.
5. Saban tahoen sekali atau dimana ada perloenja PKI bikin Kongres dimana oetoesan-oetoesan SI Merah dan PKI menentoekan sikap-sikap goena membela keperloeannja rajat Hindia.
6. Lokal-lokal SI Merah tidak perloe bayar contributie pada PKI hanja mesti mengongkosi oetoesan-oetoesan ke Kongres saja satoe tahoen sekali.
7. Modal PKI haroes didapat dari tjabang-tjabang PKI (80% Contributie jang masoek di tjabang PKI misti di stort pada Hoofdbestuur PKI).

8. SI-SI Merah dengan begitoe poenja modal tjoekoep boeat membela lid-lid-nja, sebab tidak oesah bajar contributie pada Hoofdbestuur PKI dan djoega tidak perloe kirim ongkos boeat propagandist-propagandist PKI dan SI Merah, seperti Hadji Misbach, saudara Darsono, Abdoelrachman, dan lain-lain lagi ongkos djalan propagandist-propagandist kita akan dibajar oleh modal PKI jang akan terdapat dari lid-lid PKI.
9. Dimana masih ada SI Kapitalist di Tjokroaminoto disitoe PKI akan bikin tjabang PKI dan Sarekat-Rajat (SR) jang akan kerdja bersama—ama ditempat itoe dengan PKI precies sebagai di lain-lain tempat PKI dan SI merah kerdja bersama-sama.
10. Keterangan lebih djaoeh saudara-saudara boleh minta pada Hoofdbestur PKI sekarang soedah njatalah, bahwa SI Merah, PKI serta kemoedian Sarekat Rajat mendjadi satoe” (Matahari, 1923).

Perebutan Ruang Publik Sarekat Rakyat di Priangan dan Respons Pemerintah Kolonial

“Jang Melemahkan Pergerakan Boemipoetra” adalah judul artikel yang ditulis di surat kabar berhaluan Nasionalisme yang terbit di Bandung. Surat kabar itu adalah Kaoem Kita. Kritik tentang perpecahan di tubuh SI yang semakin memuncak oleh Kaoem Kita ditulis secara berkala pada terbitan 27-29 Oktober 1924 (jauh setelah SI pecah). Salah satu artikel yang dimuat oleh surat kabar Kaoem Kita adalah artikel yang menulis bahwa keteguhan pergerakan itu ada bersendi dan bernadi (artinya bernyawa) kepada keteguhan moralnya para pemimpin-pemimpin pergerakan itu. Sebaliknya, jika pergerakan yang dipimpin oleh orang-orang yang tipis dan rendah moralnya, maka tidak akan serius dalam pergerakannya. Selanjutnya sedikit dituliskan dalam artikel *“Jang Melemahkan Pergerakan Boemipoetra”* itu sebagai berikut:

“...Selainnja dari itoe akan tegoeh poela pendirian pergerakan, kalau aman soesoennnja, dan kalau aman keadaannja dalam sidang pemimpin. Tapi makin banjak ditimboelkan perselisihan makin longgarlah peroemahan pergerakan itoe, achirnya ia poen roeboeh” (Kaoem Kita, 1924).

Perselisihan di dalam sidang para pemimpin, perselisihan yang berada di dalam organisasi itu sudah tentu tidak boleh didiamkan begitu saja. Penyerangan yang dilakukan oleh CSI kepada *“Semarangan”* (SI Merah di Semarang) diawali dari tahun 1916 sampai 1921. Akhirnya ketika SI pecah karena kongres Madiun dan SR di Sukabumi nyatalah lemah CSI. Artikel ini ditulis oleh orang yang berinisial A.M (kemungkinan yang menulis Abdoel Moeis).

Menanggapi persoalan perpecahan ditubuh SI perdebatan antara SR dengan SI di beberapa *vergadering* seringkali terjadi, salah satunya pertemuan yang dilaksanakan di gedung S.I.S. ruang pertemuan, Bandung pada tanggal 25 November 1923. Debat ini dikarenakan SI Garut (SI Tjokro) menantang PKI Bandung. Jalannya pertemuan ini dimulai Pukul 9 pagi. *Vergadering* dibuka oleh Winanta yang menerangkan maksud dan tujuan membuat pertemuan ini. Winanta memberikan kesempatan kepada peserta yang hadir dalam pertemuan ini untuk bersedia menjadi *voorzitteren* yang memimpin jalannya *vergadering*. Para hadirin dari pihak

SR dan SI yang hadir sangat banyak, dituliskan bahwa dari pukul 7 pagi orang-orang sudah masuk mengisi ruang-ruang di S.I.S untuk melihat acara *vergadering* ini.

Goenawan terpilih menjadi *voorzitteren* untuk memimpin *vergadering*, dan disepakati oleh pihak SI. Sebelum *vergadering* dibuka pihak SR dan SI diberikan kesempatan untuk menerangkan. Setelah sepakat *vergadering* dibuka. Pihak dari SI Soeroso berbicara lebih dulu, dari kedua belah pihak diberikan waktu yang sama yaitu satu jam untuk menerangkan. *Vergadering* ribut karena Soeroso tidak menetapkan agenda yang dibawa dari SI, melainkan berbicara kritik secara personal kepada Moh. Sanoesi, padahal Soeroso sendiri bukanlah pengurus SR. Akhirnya Soeroso mengaku salah, lalu dicabut lagi cerita mengenai kritik personal kepada Moh Sanoesi. Soeroso menyebutkan bahwa dirinya tidak ada prasangka buruk kepada SR, dan SR Bandung bersih. Semua audiens di *vergadering* bersorak dan berteriak SR bersih! Soeroso kemudian menjelaskan asas SI panjang lebar.

Asas SI pada dasarnya menganut ajaran agama Islam berbeda dengan asas SI Merah/SR. Soeroso tetap berbicara bahwa asas SI yang berlandaskan Islam sangat berbeda dengan SR. Kemudian keduanya saling bicara, hingga akhirnya ditenangkan oleh *voorzitteren*. Tibalah bagian SR yang berbicara, berbeda dengan Soeroso dari SI. Ketika pihak SR berbicara di *vergadering*, para peserta *vergadering* sangatlah gembira, sorak sorai sampai tidak terdengar jelas karena sangat ramainya suasana pertemuan debat tersebut. Setelah dari pihak SR selesai berbicara di *vergadering* debat dimulai. Pihak SI menceritakan dengan menjelekan-jelekan komunisme. Disebutkan bahwa komunis itu tidak bertuhan.

“eta djalma communist mah heunteu bertuhan da PKI neutral tina agama ari PSI mah asasna ge dasar Agama Islam enz....” (“itu orang komunis tidak bertuhan karena PKI keluar dari agama, kalau PSI asasnya memakai dasar Agama Islam”) (Soerapati, 1924).

Vergadering lalu ribut minta untuk distop perkataan dari Soeroso, audiens berteriak-teriak dari luar *“parantos bae koelan”* (sudah saja tuan) dan *“mangga bae tjalik”* (silahkan saja duduk). Suasana riuh dan ribut ketika *vergadering* sering diperingatkan oleh *voorzitteren*. Dari pihak SI banyak menanggung malu akibat sering diteriakinya ketika pihak SI/PSI sedang berbicara dan berpendapat. Sampai speaker dari pihak SI digunakan dan membacakan surat kabar *Neratja* yang menyebutkan bahwa komunis itu merusak agama, buktinya di Rusia masjid dipake rumah bola. Kemudian dari pihak SI berbicara dari buku karangan Malaka menyebutkan... (belum lagi jelaskan) suara para audiens *vergadering* sudah sangat ribut berteriak *“ngabobohong”* (berbohong) dan *“eta mah ngalamoen”* (itu hanya khayalan). *Voorzitteren* berdiri dan menenangkan suasana *vergadering*. Semua orang akhirnya tenang. Serangan SI kepada SR dapat dibalas oleh SR, *vergadering* kembali ramai dan riuh gembira. SR menyebutkan bahwa surat kabar *Neratja* adalah surat kabar penyokong gerakan kapitalis³ akhirnya Kiai SI tidak bisa bercerita lagi. Obrolan dari SI dibalas dengan teriakan-teriakan audiens yang membela SR. Melihat *vergadering* yang dilaksanakan di Bandung tersebut menghasilkan coreng muka karena dipermalukannya PSI.

³Sebenarnya surat kabar *Neratja* adalah surat kabar penyokong gerakan teosophie.

Surat Kabar Soerapati No. 2 yang terbit pada 20 Januari 1924, menuliskan berita tentang pengunduran diri Bratanata Presiden SI Cirebon. Comisaris Centraal SI, sekarang sudah berhenti dari SI. Pilihannya ada tiga, yaitu SI Merah, PKI, atau Sarekat Rajat.

ROEPA - ROEPA TJATETAN
Rek biloek kamana...?
Meunang bedja jen doeloer Bratana
ta, President S. I. Cheribon, Commis-
saris Centraal S. I, ajeuna geus eureun
tina kalangan S. I.
Ajeuna tinggal tiloe piliheun. S. I.
merah, P. K. I. atawa Sarikat Rajat!!!
—o—

Gambar 4. Berita di Surat Kabar Soerapati Tahun 1924
(Sumber: Surat Kabar Soerapati, No. 2 tanggal 20 Januari 1924).

"Ayeuna tinggal tiloe piliheun. SI merah, P.K.I, atawa Sarikat Rajat!!!" (Sekarang hanya tiga pilihan, SI merah, P.K.I, atau Sarekat Rakyat!!!) adalah sebuah fakta bahwa ketiga lembaga ini berbeda. Terminologi SI merah lahir ketika dinamika di internal SI tentang *pan-islamisme*. Pada hari sabtu malam tanggal 22 November 1924. Sarekat Rajat cabang Tasikmalaya melaksanakan *vergadering* bertempat di Sekolah Rajat Kp. Legokontjong yang hadir dalam *vergadering* tersebut kurang lebih 1.600 orang perempuan dan laki-laki dan polisi. Beberapa utusan SR yang hadir dalam *vergadering* tersebut diantaranya perwakilan SR dari: Ciamis, Banjar, Singaparna, Radjapolah, Garut dan Cikoneng.

Vergadering dibuka jam 8 malam. *Voorziter* Sastrodihardjo yang memimpin jalannya *vergadering*, yang berbicara adalah Soepradja. Ia menjelaskan tentang permasalahan *"reactie"* (yang menjadi penghalang gerakan SR) yang selalu memfitnah SR berdampak pada penggeledahan yang dilakukan oleh polisi pada hari rabu 19 November 1924. Selain Soepradja yang berbicara di *vergadering* SR Tasikmalaya, Kartaatmadja dari Bandung berbicara azas dan tujuan SR. Kartaatmadja berbicara dengan panjang lebar dan pembicara selanjutnya adalah Darmoprawiro. Ia berbicara tentang perkumpulan yang membela rakyat dan perkumpulan PEB yang memakai kedok agama, juga krisis di dunia. Pembicaraan Darmoprawiro sempat diberhentikan oleh polisi, lalu ia kembali berbicara dan menjelaskan tentang *vlootwet* (kebijakan pengadaan kapal perang) yang akan datang dan sedang dirumuskan di *volksraad* pada tanggal 12 bulan November.

Pembahasan selanjutnya oleh Soepradja yang membahas mengenai konsep nasionalisme di Indonesia, hingga akhirnya Soepradja menyebut bahwa *volksraad* (dewan rakyat) itu bukanlah *volksraad* yang mewakili suara rakyat, melainkan PEB raad, polisi memberhentikan pembicaraan Soepradja, namun sebagian besar peserta yang hadir dalam *vergadering* tersebut berkata "lanjutkan". Ditengah suasana gaduh *voorzitter* berdiri dan mengetuk palu dengan maksud menenangkan *vergadering* yang sedang berlanjut. Namun suara peluit yang dibunyikan oleh

wedana membuat puluhan polisi yang berjaga diluar dan didalam *vergadering* berjaga dan bergegas membubarkan *vergadering* dengan kekerasan. Polisi yang berada di luar menendang dan merusak bilik halaman tempat *vergadering* sampai hancur. Polisi sambil membawa pedang masuk kedalam kerumunan *vergadering* mengangkat pedang dan berusaha membubarkan *vergadering*. Seluruh peserta *vergadering* ketakutan lari dan *vergadering* SR di tasik harus berdampak kepada penangkapan Sastrodihardo dan Soepradja.

Menurut beberapa sumber banyak orang terluka dari *vergadering* SR di tasikmalaya ini (Soerapati, 1924). Polisi akhirnya dimasukkan ke setiap *vergadering-vergadering* organisasi pergerakan. Hal ini bersifat rahasia. Penangkapan-penangkapan bahkan penembakan terjadi kepada para anggota PKI dan Sarekat Rakjat. Penangkapan beberapa anggota PKI pada tahun 1924 sampai 1925 di antaranya adalah: Muso, Poerwadinata, Sardjono, dan Kartawirja. Penangkapan Muso karena permasalahan demonstrasi setelah *vergadering*, Muso dipanggil ke *landgerecht*. Akhirnya *Landrechter* menjatuhkan hukuman 8 hari penjara bagi Muso. Selanjutnya penangkapan Poerwadinata. Poerwadinata adalah salah satu ketua Sarekat Rakjat di Ciwidey, karena perkaranya ia dijatuhkan hukuman 7 bulan penjara.

Tanggal 14 bulan Juni 1924 ditangkap pula Sardjono karena permasalahan *vergadering* di Ciamis yang berujung kepada keributan. Sardjono pun dimasukkan ke dalam penjara sambil menunggu pengadilan untuk putusan hukuman. Mengenai permasalahan *spreek delicht* di *Openbare vergadering* Sarekat Rakjat Ciamis. Akhirnya pada tanggal 27 Agustus 1924 Muso keluar dari penjara. Sardjono sampai tanggal 3 Oktober belum juga diperiksa oleh polisi. Sarekat Rakyat akhirnya mengirim telegram ke *pokrol jenderal*, yang ditandatangani oleh Sambik *Voorzitter* Sarekat Rakjat untuk meminta Sardjono.

Spreekdelicht di *Openbare vergadering* VSTP di Semarang yang dipimpin oleh Ali Archam berujung rusuh. Ali Archam pada waktu yang sama ditangkap dan dimasukkan ke penjara. Hasil putusan sidang pengadilan, Ali Archam dituntut 6 bulan penjara. Selain Ali Archam, seorang *onderwijzer Rajatschool* Tasikmalaya bernama Soepradja menerima *besluit* bahwa dirinya diskors karena keterlibatannya dengan Sarekat Rakjat.

Soepradja tidak bisa mengajar selama satu tahun. Soepradja akhirnya dipanggil *Hoofdbureau van Poitie* Bandung pada tanggal 17 Februari 1925. Terkait penangkapan anggota PKI. Jahja, Oenoeng, Moelio yang sekarang dipenjara. Semua pertanyaan yang diajukan oleh polisi Soepradja menjawab “tidak tahu”. Beberapa orang yang dibuang karena gerakan *revolusioner* yang dilakukan di antaranya adalah Mardjohan, Darsono dan Ali Archam, Sneevliet, Brandsteder, Baars, Bergsma, Tan Malaka, Semaon, H, Misbach, Datoek Batoeah, Natar Zainoedin, beberapa anggota PKI yang dibuang dengan cara halus di antaranya adalah Van Burink, Dekker, Njonja Sneevliet, Van Kondernoordit dan Van Munster. Hal ini terus berlanjut sampai tahun 1925 hingga meletusnya peristiwa pemberontakan Komunis di Priangan Banten dan Silungkang.

Kesimpulan

Sejarah Indonesia pada periodisasi pergerakan nasional pertengahan tahun 1900-an mengalami situasi yang cukup sulit. Perbedaan cara pandang secara

ideologis dalam memperjuangkan "kemerdekaan" atau kemandirian secara ekonomi dan politik sebagai sebuah bangsa harus menempatkan salah satu organisasi yang cukup berpengaruh dan progresif yaitu Sarekat Dagang Islam. Perkembangan organisasi Sarekat Dagang Islam pada masa pergerakan nasional sangat menarik untuk dikaji karena perjalanannya sebagai sebuah organisasi pergerakan nasional harus terbagi atau terbelah karena kepentingan ideologi. Semenjak didirikan dan diinisiasi oleh Haji Samanhoe di dan Tirta Adhi Soerjo pada tahun 1909, organisasi Sarekat Dagang Islam mengalami perkembangan yang cukup pesat, hingga akhirnya pada tahun 1915 Organisasi ini diubah namanya oleh salah satu ketua cabang Sarekat Dagang Islam dari Soerabaja yaitu H.O.S Tjokroaminoto. Sarekat Dagang Islam yang diubah menjadi Sarekat Islam oleh H.O.S Tjokroaminoto merupakan perubahan fundamental organisasi dari yang awalnya merupakan organisasi ekonomi-sosial, menjadi ekonomi-politik.

Setelah organisasi Sarekat Islam disahkan dan diakui oleh pemerintah kolonial Hindia-Belanda, organisasi Sarekat Islam yang berhadapan dengan persoalan atau konflik internal yang terjadi di dalam tubuh organisasi Sarekat Islam itu sendiri. Gagasan ideologi sosialisme barat yang dibawa oleh "orang-orang kiri" yang berhaluan sosialis-demokrat dari Belanda ikut mewarnai gagasan organisasi Sarekat Islam hingga lahir sebuah "term" Sarekat Islam Putih dan Sarekat Islam merah. Hal ini diawali oleh kebijakan organisasi Sarekat Islam yang dipimpin oleh H.O.S Tjokroaminoto yang mendukung gagasan *Indie Weebaar*. Perpecahan di tubuh organisasi Sarekat Islam setelah peristiwa *Indie Weebaar* terjadi ketika Sarekat Islam di Jogjakarta pada tahun 1921 dilaksanakan. Ide dan gagasan organisasi Sarekat Islam yang mendukung penuh gerakan PAN-ISLAMISME harus dilaksanakan dengan menyingkirkan ide-ide sosialisme dan komunisme. Puncak perpecahan yang terjadi di internal organisasi Sarekat Islam adalah hasil dari keputusan kongres Sarekat Islam di Madiun tahun 1923 yang menghasilkan keputusan pemecatan kepada anggota-anggota Sarekat Islam yang terafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia. Keputusan ini kemudian dikenal dengan nama keputusan "Disiplin Partai".

Organisasi Sarekat Islam kemudian menjadi terbagi dua. Organisasi Sarekat Islam yang masih memperjuangkan cita-cita kemerdekaan dan kesetaraan melalui ideologi Islam dan perjuangan politiknya melalui Partai Sarekat Islam dan pecahan organisasi Sarekat Islam yang dicap "radikal" atau biasa disebut dengan Sarekat Islam Merah menjadi Sarekat Rakyat yang memperjuangkan cita-cita kemerdekaan dan kesetaraan melalui ideologi islam dan sosialisme-komunisme. Sampai tahun 1925 dan tahun 1927 perjuangan organisasi Sarekat Islam Putih dan Merah harus berakhir dengan penangkapan-penangkapan para aktivis organisasi Sarekat Islam yang dibuang ke Boven Digul. Setelah gelombang penangkapan, pemenjaraan, dan pembuangan aktivis ke Boven Digul pada pertengahan hingga akhir 1920-an, aktivitas Sarekat Islam maupun Sarekat Rakyat mengalami kemunduran yang sangat signifikan sehingga pengaruh dan kemampuan organisasi untuk melakukan mobilisasi massa melemah, meskipun organisasi tersebut tidak langsung berhenti secara formal tetapi kehilangan banyak pemimpin dan basis gerak politiknya.

Referensi

- Achdian, A. (2017). Sarekat Islam sebagai kelanjutan Boedi Oetomo: HOS Tjokroaminoto dan awal kebangkitan nasional di Kota Surabaya, 1908–1912. *Jurnal Sejarah*, 1(1), 30-51. <https://msi.or.id/journal/index.php/js/article/view/3>.
- Adam, A. (2003). *Sejarah Awal Pers dan Kebangkitan Kesadaran Keindonesiaan, 1855-1913*. Pustaka Pelajar.
- Ahmad, F. (2021). From Struggling to Maintaining Power: Cokroaminoto's Maneuver in Political Crisis of Sarekat Islam in 1912–1921. *ISLAH: Journal of Islamic Literature and History*, 2(2), 163-179. <https://ejournal.iainsalatiga.ac.id/index.php/isliah/article/view/6278>.
- Ahmad, M. G. & Mahasta, M. A. (2021). Dinamika Sarekat Islam dan Komunis (Proses Penyusupan Komunis dan Perpecahan Sarekat Islam). *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 20(2), 62–67. <https://doi.org/10.32939/islamika.v20i02.690>.
- Akbar, A. (2013). *Memata-matai Kaum Pergerakan: Dinas Intelejen Politik Hindia Belanda 1916-1934*. Marjin Kiri.
- Amin, S. (2013). *Perrjoangan Paguyuban Pasundan 1914-1942*. Pustaka Jaya.
- Eriyanto. (2011). *Analisis Framing, Konstruksi, Ideologi dan Politik Media*. LKiS.
- Femia, J. (1975). Hegemony and consciousness in the thought of Antonio Gramsci. *Political studies*, 23(1), 29-48. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.1975.tb00044.x>.
- Garraghan, G J. S.J. (1957). *A Guide to Historical Method Vol I & Vol. II*. Fordham University Press.
- Gie, S H. (1999). *Di Bawah Lentera Merah*. Yayasan Bentang Budaya.
- Gie, S. H. (1999). *Di bawah Lentera Merah*. Bentang Budaya.
- Gottschalk, L. (2008). *Mengerti Sejarah*. Universitas Indonesia Press.
- Habermas, J. (2010). *Ruang Publik (Terjemahan Yudi Santoso)*. Kreasi Wacana.
- Herlina, N. (2008). *Metode Sejarah*. Satya Historika.
- Jayusman, I. & Shavab, O. A. K. (2021). Peranan Sarekat Islam (SI) dan Muhammadiyah sebagai Gerakan Politik dan Pendidikan pada Masa Pergerakan Nasional. *Candrasangkala: Jurnal Pendidikan dan Sejarah*, 7(2), 82-92. <https://doi.org/10.30870/candrasangkala.v7i2.3669>.
- Kaoem Kita, 27 Oktober 1924.
- Kaoem Kita, 28 Oktober 1924.
- Kaoem Kita, 29 Oktober 1924.
- Karim, Z., & Siregar, Y. D. (2023). Sarekat Islam dalam Pergerakan Nasional Indonesia di Medan: Kajian Surat Kabar Benih Merdeka, 1919–1942. *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(2), 316-323. <https://doi.org/10.30743/mkd.v7i2.7550>.

Matahari, 15 Maret 1923

Matahari, 17 April 1923.

Matahari, 22 September 1923.

Matahari, 27 Agustus 1922

Mc.Vey, R. (2009). *Kemunculan Komunisme Indonesia*. Komunitas Bambu.

Ricklefs, M. C. (2008). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Serambi.

Rizkianto, A. (2022). Dakwah dan Pendidikan Sarekat Islam sebagai Fase Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(1), 25-36. <https://doi.org/10.24269/jpk.v7i1.5083>.

Salam, M. (2013). Revolusi di Puser dayeuh. *Soekapoera Institute*, 1(1), 71–82. 2338-4360.

Shiraishi, T. (2005). *Zaman Bergerak, Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926*. Pustaka Utama Grafiti.

Sinar Hindia, 8 Mei 1918.

Soerapati, 20 Januari 1924

Soerapati, 26 November 1924.

Urbinati, N. (1998). From the periphery of modernity: Antonio Gramsci's theory of subordination and hegemony. *Political Theory*, 26(3), 370-391. <https://doi.org/10.1177/0090591798026003005>.

Wardani, D. T. (2016). Peranan Surat Kabar Soerapati dalam Perlawanan Intelektual Pribumi di Jawa Barat Tahun 1923-1925. *Patanjala*, 8(1), 1-20. <https://doi.org/10.30959/patanjala.v8i1.54>.

Wardani, T. (2015). *Mengabarkan Gerakan: Surat Kabar Anti-Kolonialisme 1920-1926*. Kentja Press.